

## Laporan Indeks Inovasi Daerah

Nama SKPD / Kelompok	: Inspektorat
Nama Inovasi	: Digitalisasi Agenda Penomoran Hasil Pemeriksaan (LHP dan Surat Tugas)
Tahapan Inovasi	: Penerapan
Inisiator Inovasi Daerah	: Muhammad Baihaqi, S.E. (ASN)
Bentuk Inovasi	: Tata Kelola
Inovasi Dimulai	: 02 January 2023
Latar Belakang	<p>Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan kedudukan Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.</p> <p>Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Pelaksanaan Audit menyebutkan Auditor harus membuat laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan penugasannya yang disusun dalam format yang sesuai segera setelah selesai melakukan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan merupakan hasil akhir dari proses audit. Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan ringkas mungkin. Tepat Waktu Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka laporan pemeriksaan harus tepat waktu. Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlambat disampaikan, nilainya menjadi kurang bagi pengguna laporan hasil audit. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan melakukan audit dengan dasar pemikiran tersebut.</p>
Permasalahan (Hulu)	: Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Pembantu Wilayah I, untuk menghadapi ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan, kondisi Inspektorat Kabupaten Balangan saat ini terkendala oleh masih menggunakan nya agenda penomoran manual. Dimana penomoran Laporan Hasil Pemeriksaan kurang efektif dikarenakan masih manual dengan buku agenda yang mengakibatkan buku agenda tersebut rawan tercecer, sehingga mengakibatkan tertunda nya penomoran karena harus mencari buku agenda nya terlebih dahulu. Agenda penomoran manual juga dapat mengakibatkan kesalahpahaman antar pegawai.
Metode & Strategi Pemecahan Masalah	: Inovator bermaksud membantu membuat agenda penomoran laporan hasil pemeriksaan yang dapat membantu dalam hal terlaksana nya ketepatan waktu dalam pelaporan hasil pemeriksaan. Yaitu dengan cara merubah penomoran yang sebelum nya hanya dalam bentuk manual ke dalam bentuk digital. Sehingga siapapun yang membutuhkan dapat mengakses dengan mudah. Sehingga dapat terlaksana secara efisien.
Manfaat atau Dampak Hilir	: Digitalisasi agenda penomoran ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan tim, meminimalisir kesalahpahaman antar pegawai, serta dapat meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.
Isian Indikator	:

No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bobot	Bukti Dukung
-----	-----------	------------	-----------	-------	--------------

1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah		-	N/A
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)		-	N/A
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)		-	N/A
4	Penggunaan IT	Penggunaan IT dalam pelaksanaan inovasi yang diterapkan		-	N/A
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah		-	N/A
6	Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah		-	N/A
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)		-	N/A
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah		-	N/A
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)		-	N/A
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		-	N/A
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book		-	N/A
12	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan		-	N/A
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi		-	N/A

14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir		-	N/A
15	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring (2 tahun terakhir)		-	N/A
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)		-	N/A
17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah		-	N/A
18	Kemanfaatan Inovasi	Jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah		-	N/A
19	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		-	N/A
20	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		-	N/A